

Komunikasi Partisipatif dan Internalisasi Nilai Integritas pada Program Kelas Pemuda Antikorupsi KPK Tahun 2025

Deryl Ardica¹, Tahmid Miftachurrozaq²

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Bina Muwahhidin Boyolali dan deryldica99@gmail.com

² Sekolah Tinggi Agama Islam Bina Muwahhidin Boyolali dan tahmidmiftachurrozaq98@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi di Indonesia merupakan persoalan multidimensi yang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga melemahkan integritas moral generasi muda. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi berbasis nilai menjadi strategi penting dalam upaya pencegahan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran komunikasi partisipatif dalam proses internalisasi nilai integritas pada Program Kelas Pemuda Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif reflektif dengan paradigma fenomenologis. Populasi penelitian adalah seluruh peserta Program Kelas Pemuda Antikorupsi 2025, dengan sampel purposif sebanyak 50 peserta terpilih pada pelaksanaan program di Semarang, Jawa Tengah. Peneliti merupakan partisipan aktif dalam kegiatan, sehingga teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, jurnal refleksi, dan studi dokumen. Analisis data menggunakan teknik analisis tematik-induktif untuk mengidentifikasi pola komunikasi dan proses internalisasi nilai integritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi partisipatif yang dialogis, egaliter, dan kolaboratif mampu mendorong internalisasi nilai integritas secara menyeluruh pada dimensi kognitif, afektif, dan konatif. Nilai kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, dan keberanian moral menjadi nilai yang paling dominan terinternalisasi pada peserta. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan reflektif-partisipatif dalam mengkaji pendidikan antikorupsi pemuda, yang menempatkan komunikasi sebagai proses pembentukan kesadaran moral kolektif. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi partisipatif dapat dijadikan model strategis dalam pengembangan pendidikan antikorupsi dan pembentukan budaya integritas pemuda di Indonesia.

Kata Kunci: Komunikasi Partisipatif, Internalisasi Nilai Integritas, Pendidikan Antikorupsi, Pemuda, Tahun 2025.

ABSTRACT

Corruption in Indonesia is a multidimensional problem that not only causes economic losses but also weakens the moral integrity of the younger generation. Therefore, value-based anti-corruption education is an essential strategy in corruption prevention efforts. This study aims to analyze the role of participatory communication in the internalization of integrity values within the 2025 Anti-Corruption Youth Class Program organized by the Corruption Eradication Commission (KPK). The research employs a reflective qualitative approach within a phenomenological paradigm. The research population consists of all participants of the 2025 Anti-Corruption Youth Class Program, with a purposive sample of 50 selected participants from the Semarang implementation in Central Java. The researcher acted as an active participant; therefore, data were collected through participatory observation, reflective journals, and document analysis. Data analysis was conducted using inductive thematic analysis to identify patterns of communication and the process of integrity value internalization. The findings indicate that dialogical, egalitarian, and collaborative participatory communication effectively supports the internalization of integrity values across cognitive, affective, and conative dimensions. Honesty, responsibility, social concern, and moral courage emerged as the most strongly internalized values among participants. The novelty of this study lies in its reflective-participatory approach to examining youth anti-corruption education by positioning communication as a process of collective moral consciousness formation. The findings imply that participatory communication can serve as a strategic model for developing anti-corruption education and fostering a culture of integrity among Indonesian youth.

Keywords: Anti-Corruption Education, Integrity Values Internalization, Participatory Communication, Youth, 2025.

PENDAHULUAN

Fenomena korupsi di Indonesia merupakan persoalan multidimensi yang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, moral, dan budaya bangsa (Nainggolan, 2024). Korupsi yang telah mengakar dalam berbagai lapisan masyarakat menandakan adanya krisis nilai integritas yang serius. Krisis ini tidak hanya terjadi di tingkat elit politik dan birokrasi, tetapi juga mengancam karakter generasi muda yang merupakan agen perubahan masa depan. Dalam konteks ini, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum dan penegakan sanksi, melainkan juga melalui transformasi budaya dan pendidikan nilai antikorupsi yang berkelanjutan.

Pendidikan antikorupsi merupakan bagian dari strategi preventif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menekankan pentingnya menanamkan nilai integritas sejak dini (Asmorojati, 2017). Sejalan dengan mandatnya dalam bidang pencegahan, KPK tidak hanya berfokus pada penindakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat melalui berbagai program pendidikan dan kampanye nilai. Salah satu inisiatif strategis yang dikembangkan dalam kerangka ini adalah Program Kelas Pemuda dan LSM Antikorupsi, di bawah koordinasi Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas pemuda dan organisasi masyarakat sipil dalam memahami isu-isu korupsi serta memperkuat peran mereka dalam pencegahan, pendidikan, dan advokasi antikorupsi di tingkat komunitas. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk membangun jejaring dan kemitraan strategis antara KPK dan para pemuda di berbagai daerah sebagai bagian dari gerakan nasional pemberantasan korupsi. Sejak diluncurkan pada tahun 2021 sebagai kelanjutan dari Sekolah Pemuda Desa, kegiatan ini telah dilaksanakan di 22 provinsi di Indonesia hingga Desember 2024, dengan total 1.769 peserta yang berperan sebagai agen-agen integritas di lingkungannya masing-masing (KPK RI, 2025). Pada tahun 2025, program ini berkembang dalam bentuk Kelas Pemuda Antikorupsi yang diselenggarakan di tiga kota besar Semarang (Jawa Tengah), Padang (Sumatera Barat), dan Samarinda (Kalimantan Timur) sebagai upaya memperluas jejaring pemuda antikorupsi dan memperkuat sinergi antara pendidikan nilai, pemberdayaan sosial, dan gerakan moral di kalangan generasi muda Indonesia (Permas, 2025).

Setiap kota menjadi tuan rumah bagi kelompok peserta berbeda yang telah melalui proses seleksi ketat. Kegiatan kelas pemuda antikorupsi di Semarang- Jawa tengah terdapat 50 peserta terpilih dari total 1.036 kandidat yang mendaftar secara nasional, terdiri dari aktivis komunitas, penggerak organisasi kepemudaan, dan pegiat sosial masyarakat sipil. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Bapak Ibnu Basuki Widodo pada Acara Pembukaan. Peneliti sendiri merupakan salah satu peserta Kelas Pemuda Antikorupsi 2025 wilayah Semarang, Jawa Tengah, yang diselenggarakan pada 29 hingga 30 Oktober 2025. Program ini menjadi wadah intensif selama dua hari bagi para pemuda untuk berdialog, berdiskusi, dan merancang strategi bersama dalam membangun gerakan antikorupsi berbasis nilai integritas.

Program Kelas Pemuda Antikorupsi 2025 menjadi menarik untuk dikaji karena menggunakan pendekatan komunikasi partisipatif sebagai metode utama pembelajaran dan interaksi antar peserta. Pendekatan ini menempatkan pemuda bukan sebagai objek penerima materi, tetapi sebagai subjek aktif yang berpartisipasi dalam dialog, refleksi, dan kolaborasi. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi diskusi kelompok, simulasi kasus, *role play*, serta refleksi nilai integritas. Dalam proses ini, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoretis tentang korupsi dan dampaknya, tetapi juga mengalami proses transformasi nilai secara langsung melalui pengalaman komunikasi yang egaliter dan dialogis.

Pendekatan komunikasi partisipatif berakar pada pemikiran Paulo Freire (1970) dalam *Pedagogy of the Oppressed*, yang menolak model pendidikan “banking system” di mana pengajar hanya mentransfer pengetahuan kepada peserta pasif. Sebaliknya, Freire menekankan pentingnya dialog dan refleksi kritis (*critical consciousness*) sebagai sarana untuk membebaskan individu dari ketidaktahuan dan ketidakadilan sosial (Freire & Macedo, 2014). Dalam konteks pendidikan antikorupsi, komunikasi partisipatif tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan tentang korupsi, tetapi juga membangkitkan kesadaran etis dan moral untuk menolak perilaku koruptif. Melalui interaksi yang setara, peserta didorong untuk mengidentifikasi masalah sosial di lingkungannya, mengkritisi akar penyebabnya, dan membangun solusi bersama berdasarkan nilai-nilai integritas.

Menurut Servaes (1999), komunikasi partisipatif merupakan paradigma komunikasi pembangunan yang menekankan pentingnya *ownership* (kepemilikan) dan *empowerment* (pemberdayaan), (Muhammad dkk., 2025). Komunikasi bukan sekadar penyampaian pesan, tetapi proses sosial yang memungkinkan masyarakat membentuk makna bersama dan mengambil tindakan kolektif (Aditia, 2021). Dalam konteks Program Kelas Pemuda Antikorupsi, komunikasi partisipatif berfungsi sebagai ruang dialog sosial di mana nilai-nilai antikorupsi dipahami, dihayati, dan diinternalisasi secara bersama. Dengan demikian, komunikasi partisipatif berperan ganda: sebagai alat pendidikan nilai, sekaligus sebagai media pemberdayaan pemuda untuk menjadi subjek perubahan sosial.

Nilai-nilai integritas yang diusung KPK kejujuran, kepedulian, kemandirian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keadilan, keberanian, dan kedisiplinan merupakan pedoman moral dalam membangun karakter individu yang antikorupsi (Asman dkk., 2024). Menurut Rokeach (1973), nilai adalah keyakinan fundamental yang menjadi dasar preferensi perilaku dan penilaian moral seseorang. Nilai tidak dapat sekadar diajarkan, melainkan harus diinternalisasi melalui proses komunikasi sosial, interaksi, dan refleksi personal (Erni Irdewanti dkk., 2025). Sementara Lickona (1991) dalam *Educating for Character* menegaskan bahwa pendidikan karakter yang efektif menuntut keterlibatan emosional dan tindakan nyata, bukan hanya pengetahuan kognitif (Damariswara dkk., 2021). Oleh karena itu, internalisasi nilai integritas memerlukan ruang komunikasi yang memungkinkan individu mengalami, menafsirkan, dan mengaktualisasikan nilai tersebut dalam perilaku sehari-hari.

Dalam perspektif komunikasi pendidikan, proses internalisasi nilai berlangsung dalam tiga tahap utama: (1) *cognitive understanding* pemahaman terhadap makna nilai; (2) *affective appreciation* penghayatan emosional terhadap nilai; dan (3) *behavioral commitment* penerapan nilai dalam tindakan nyata (Wisman, 2017). Program Kelas Pemuda Antikorupsi mengintegrasikan ketiga aspek ini melalui kombinasi metode diskusi, refleksi nilai, dan praktik sosial. Misalnya, dalam sesi “*Integrity in Action*”, peserta diminta menganalisis dilema etika dalam kehidupan sehari-hari, mendiskusikan alternatif keputusan, dan menuliskan komitmen pribadi yang merefleksikan nilai-nilai integritas. Aktivitas semacam ini menciptakan pengalaman belajar yang transformatif dan memperkuat internalisasi nilai secara berkelanjutan.

Dalam beberapa penelitian terdahulu, model komunikasi partisipatif telah terbukti efektif dalam pendidikan nilai dan pemberdayaan masyarakat. Mefalopulos (2008) menyebutkan bahwa pendekatan partisipatif mendorong keterlibatan emosional dan tanggung jawab sosial individu dalam proses belajar (Pranata dkk., 2021). Demikian pula, Melkote & Steeves (2001) menegaskan bahwa partisipasi aktif memperkuat *self-efficacy* dan kesadaran kolektif, yang menjadi fondasi

penting dalam perubahan perilaku sosial (Nurrindar & Wahjudi, 2021). Namun, dalam konteks Indonesia, kajian empiris tentang penerapan komunikasi partisipatif dalam pendidikan antikorupsi, khususnya di kalangan pemuda, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui kajian reflektif terhadap pelaksanaan Kelas Pemuda Antikorupsi 2025.

Selain itu, penelitian ini juga berangkat dari pandangan bahwa komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses pembentukan makna sosial (*meaning-making process*) (Haris & Amalia, 2018). Dalam kerangka teori interaksi simbolik (Blumer, 1969), makna dibangun melalui interaksi dan interpretasi sosial (Caesaria dkk., 2023). Dengan demikian, internalisasi nilai integritas dapat dipahami sebagai hasil konstruksi makna yang terbentuk melalui dialog antar individu dan pengalaman kolektif. Program Kelas Pemuda Antikorupsi menciptakan ekosistem komunikasi yang kondusif bagi proses ini, di mana peserta belajar melalui pengalaman sosial yang saling memperkaya.

Dari sudut pandang kepemudaan, keterlibatan aktif dalam program antikorupsi tidak hanya membangun kesadaran moral, tetapi juga memperkuat identitas sosial dan kepemimpinan etis. UNESCO (2018) menekankan bahwa pendidikan karakter berbasis partisipasi merupakan strategi kunci untuk membentuk *ethical citizenship* di kalangan generasi muda (Hansein Arif Wijaya dkk., 2025). Pemuda yang memahami nilai-nilai integritas melalui pengalaman langsung cenderung mengembangkan sikap kritis terhadap ketidakadilan sosial dan mampu menjadi agen perubahan dalam komunitasnya (Sahlan & Nurdin, 2022). Dengan demikian, pendekatan komunikasi partisipatif memiliki potensi strategis dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi sekaligus membangun modal sosial pemuda.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan pendidikan antikorupsi tidak hanya bergantung pada kualitas materi yang disampaikan, tetapi terutama pada proses komunikasi yang melibatkan partisipasi aktif peserta. Komunikasi partisipatif memungkinkan terciptanya pengalaman belajar yang bermakna, di mana peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengonstruksi dan memaknai nilai-nilai integritas secara personal dan kolektif (Rani, 2016). Dalam konteks ini, Program Kelas Pemuda Antikorupsi 2025 menjadi contoh konkret bagaimana komunikasi partisipatif dapat diimplementasikan sebagai strategi pembelajaran nilai dan pemberdayaan moral pemuda.

Secara konseptual, penelitian ini berpijak pada dua pilar utama: (1) paradigma komunikasi partisipatif yang menekankan dialog, kolaborasi, dan pemberdayaan; serta (2) teori internalisasi nilai yang menekankan transformasi kesadaran moral melalui interaksi sosial. Kedua pendekatan ini bersinergi untuk menjelaskan bagaimana proses komunikasi dapat menjadi wahana pembentukan integritas. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif reflektif, penelitian ini berupaya menggali pengalaman peserta dalam mengikuti Kelas Pemuda Antikorupsi 2025, serta menganalisis bagaimana komunikasi partisipatif berkontribusi terhadap proses internalisasi nilai integritas. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis bentuk-bentuk komunikasi partisipatif yang diterapkan dalam Program Kelas Pemuda Antikorupsi 2025. (2) Mengidentifikasi proses internalisasi nilai integritas yang terjadi pada peserta melalui pengalaman komunikasi partisipatif. (3) Mengkaji nilai-nilai integritas yang paling dominan terinternalisasi dalam diri peserta program.

Manfaat penelitian ini diharapkan terbagi atas dua aspek. Pertama, secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian komunikasi partisipatif dalam

konteks pendidikan nilai dan pemberdayaan pemuda. Kedua, secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi KPK, lembaga pendidikan, dan komunitas pemuda dalam merancang program pendidikan antikorupsi berbasis komunikasi dialogis dan partisipatif.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjelaskan keterkaitan antara proses komunikasi yang partisipatif dengan pembentukan budaya integritas, sebagai kontribusi terhadap penguatan karakter dan peran pemuda dalam gerakan antikorupsi di Indonesia.

LANDASAN TEORI

A. Komunikasi Persuasif

Komunikasi partisipatif merupakan pendekatan komunikasi yang menempatkan partisipan sebagai subjek aktif dalam proses komunikasi, bukan sekadar objek penerima pesan. Pendekatan ini menekankan dialog dua arah, kesetaraan peran, serta keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam membangun makna dan pengambilan keputusan bersama. Dalam komunikasi partisipatif, proses komunikasi dipandang sebagai ruang sosial untuk bertukar pengalaman, merefleksikan realitas, dan merumuskan tindakan kolektif. Paulo Freire (1970) melalui konsep *dialogical communication* menolak model komunikasi satu arah yang bersifat instruktif atau indoktrinatif. Menurut Freire, komunikasi yang membebaskan harus dilandasi dialog, kesadaran kritis (*critical consciousness*), dan refleksi bersama atas realitas sosial. Dialog tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kesadaran dan transformasi sosial. Dalam konteks pendidikan nilai, komunikasi partisipatif memungkinkan peserta untuk memahami persoalan secara kritis serta menempatkan diri sebagai bagian dari solusi.

Servaes (1999) menyatakan bahwa komunikasi partisipatif merupakan paradigma komunikasi pembangunan yang menekankan pada prinsip *ownership* dan *empowerment*. Komunikasi tidak dipahami sebagai proses transfer pesan, melainkan sebagai proses sosial yang memungkinkan individu dan komunitas membangun pemahaman bersama serta mengambil tindakan kolektif. Oleh karena itu, komunikasi partisipatif menjadi relevan dalam program-program pemberdayaan masyarakat, termasuk pendidikan antikorupsi berbasis pemuda. Dalam konteks Program Kelas Pemuda Antikorupsi, komunikasi partisipatif diwujudkan melalui diskusi kelompok, simulasi kasus, refleksi nilai, dan penyusunan rencana aksi bersama. Pola komunikasi yang egaliter dan dialogis ini mendorong keterlibatan emosional dan intelektual peserta, sehingga nilai-nilai integritas tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi juga dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sosial.

B. Internalisasi Nilai Integritas

Internalisasi nilai merupakan proses penanaman nilai ke dalam diri individu hingga nilai tersebut menjadi bagian dari kesadaran, sikap, dan perilaku. Nilai tidak hanya dipelajari sebagai konsep abstrak, tetapi dihayati dan diwujudkan dalam tindakan nyata.

Menurut Rokeach (1973), nilai adalah keyakinan fundamental yang menjadi dasar dalam menentukan pilihan, sikap, dan perilaku seseorang. Nilai berfungsi sebagai pedoman moral dalam kehidupan sosial. Nilai integritas merujuk pada kesatuan antara pikiran, ucapan, dan tindakan yang dilandasi oleh kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, dan keberanian moral. Dalam perspektif pendidikan karakter, nilai integritas tidak dapat dibentuk melalui pendekatan kognitif semata, melainkan membutuhkan pengalaman sosial, refleksi, dan pembiasaan. Oleh karena itu, proses internalisasi nilai menuntut adanya ruang komunikasi yang memungkinkan individu mengalami nilai secara langsung.

Thomas Lickona (1991) menjelaskan bahwa pendidikan karakter yang efektif mencakup tiga dimensi utama, yaitu moral *knowing* (pengetahuan moral), moral *feeling* (penghayatan moral), dan moral *action* (tindakan moral). Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan harus hadir secara simultan agar nilai dapat terinternalisasi secara utuh. Tanpa keterlibatan emosional dan praktik nyata, nilai hanya akan berhenti pada tataran pengetahuan. Dalam penelitian ini, internalisasi nilai integritas dipahami sebagai proses bertahap yang meliputi pemahaman kognitif terhadap makna integritas, penghayatan emosional terhadap nilai-nilai antikorupsi, serta komitmen perilaku untuk menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan pribadi dan sosial. Proses ini berlangsung melalui interaksi sosial dan pengalaman komunikasi partisipatif yang dialami peserta selama mengikuti Kelas Pemuda Antikorupsi.

C. Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi merupakan upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial guna mencegah perilaku koruptif sejak dulu. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum dan sanksi, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kesadaran moral individu. Menurut Asmorojati (2017), pendidikan antikorupsi merupakan bagian dari strategi preventif yang bertujuan membangun budaya antikorupsi di tengah masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan pendidikan antikorupsi sebagai salah satu pilar utama dalam upaya pencegahan korupsi. Nilai-nilai integritas yang dikembangkan KPK, seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, tanggung jawab, keberanian, dan kedisiplinan, dirancang untuk membentuk karakter individu yang beretika dan berintegritas. Pendidikan antikorupsi tidak hanya diarahkan pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku sosial.

Dalam konteks kepemudaan, pendidikan antikorupsi memiliki peran strategis karena pemuda dipandang sebagai agen perubahan sosial. Melalui pendidikan yang partisipatif dan dialogis, pemuda dapat mengembangkan kesadaran kritis terhadap praktik korupsi serta membangun komitmen moral untuk terlibat dalam gerakan antikorupsi. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi yang efektif harus berbasis pengalaman, dialog, dan partisipasi aktif peserta.

D. Komunikasi Partisipatif dalam Pendidikan Nilai Pemuda

Komunikasi partisipatif memiliki peran penting dalam mendukung proses pendidikan nilai, khususnya di kalangan pemuda. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang bersifat reflektif, kolaboratif, dan kontekstual. Melalui komunikasi partisipatif, peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga terlibat dalam proses penciptaan makna dan refleksi nilai berdasarkan pengalaman sosial mereka. Dalam perspektif interaksionisme simbolik (Blumer, 1969), makna nilai dibangun melalui interaksi sosial dan interpretasi bersama. Dengan demikian, internalisasi nilai integritas dapat dipahami sebagai hasil dari proses komunikasi yang intensif dan bermakna. Dialog, diskusi, dan refleksi kolektif memungkinkan nilai-nilai antikorupsi dipahami sebagai realitas hidup, bukan sekadar norma abstrak. Program Kelas Pemuda Antikorupsi 2025 menerapkan komunikasi partisipatif sebagai strategi utama pembelajaran. Melalui pendekatan ini, peserta didorong untuk merefleksikan dilema etika, berbagi pengalaman, serta menyusun Rencana Aksi Integritas sebagai bentuk penerapan nilai. Proses ini menunjukkan bahwa komunikasi partisipatif tidak hanya berfungsi sebagai metode pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana internalisasi nilai dan pembentukan kesadaran moral kolektif di kalangan pemuda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif reflektif dengan paradigma fenomenologis, yang berfokus pada pemaknaan pengalaman subjektif peserta Program Kelas Pemuda Antikorupsi 2025 dalam konteks komunikasi partisipatif dan internalisasi nilai integritas (Ido Priyana Hadi, 2020). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu memahami secara mendalam pengalaman dan proses pembentukan nilai yang dialami individu dalam situasi sosial tertentu. Metode fenomenologis memungkinkan peneliti menggali makna di balik tindakan, interaksi, dan refleksi peserta selama mengikuti kegiatan program.

A. Identifikasi Variabel Penelitian

Penelitian ini mengkaji dua variabel utama yang memiliki hubungan konseptual, yaitu komunikasi partisipatif sebagai variabel bebas dan internalisasi nilai integritas sebagai variabel terikat. Komunikasi partisipatif dimaknai sebagai proses komunikasi dua arah yang bersifat dialogis, kolaboratif, dan egaliter antara fasilitator dan peserta, yang mendorong keterlibatan aktif serta refleksi kritis terhadap isu antikorupsi. Sementara itu, internalisasi nilai integritas dipahami sebagai proses penanaman, penghayatan, dan penerapan nilai-nilai antikorupsi, seperti kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, keberanian moral, dan kesederhanaan, yang berkembang melalui pengalaman komunikasi dan pembelajaran sosial. Kedua variabel tersebut tidak diukur secara kuantitatif, melainkan diinterpretasikan secara mendalam melalui analisis makna dan proses pembentukan kesadaran moral peserta.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah para peserta Program Kelas Pemuda Antikorupsi 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pembinaan Peran

Serta Masyarakat. Program ini dilaksanakan di tiga wilayah besar di Indonesia, yaitu Semarang (Jawa Tengah), Padang (Sumatera Barat), dan Samarinda (Kalimantan Timur), sebagai bagian dari upaya KPK memperluas jejaring dan kapasitas pemuda antikorupsi di berbagai daerah. Penelitian difokuskan pada pelaksanaan program di Semarang, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 29–30 Oktober 2025 di bawah koordinasi KPK Jawa Tengah. Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta terpilih dari 1.036 pendaftar yang berasal dari berbagai organisasi kepemudaan, komunitas sosial, dan lembaga kemahasiswaan di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Proses seleksi dilakukan secara berlapis berdasarkan penilaian terhadap esai motivasi, pengalaman sosial, serta rekam jejak kepemimpinan peserta. Peneliti merupakan salah satu dari 50 peserta yang terpilih dalam program tersebut, sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan autoetnografis reflektif yang memanfaatkan pengalaman langsung dan observasi partisipatif untuk memahami dinamika komunikasi dan proses internalisasi nilai selama kegiatan berlangsung. Pemilihan lokasi Semarang dilakukan secara purposive karena wilayah ini mewakili keberagaman peserta dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan DIY, serta merupakan gelombang pertama dari tiga seri pelaksanaan nasional Program Kelas Pemuda Antikorupsi 2025.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah *human instrument* yang berperan sebagai pengamat, pengumpul, sekaligus penganalisis data. Sebagai partisipan aktif dalam kegiatan, peneliti mengamati pola komunikasi, dinamika kelompok, serta bentuk refleksi nilai yang muncul selama proses pembelajaran. Untuk mendukung keakuratan dan validitas data, digunakan instrumen bantu seperti jurnal refleksi harian yang berisi catatan pengalaman lapangan, observasi terbuka terhadap interaksi antar peserta lain untuk memperkaya sudut pandang. Selain itu, dokumen resmi seperti modul pelatihan, panduan nilai integritas, dan publikasi KPK tentang kegiatan Kelas Pemuda Antikorupsi turut digunakan sebagai sumber sekunder untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks kelembagaan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, dengan cara membandingkan hasil observasi, refleksi pribadi agar temuan yang diperoleh kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

D. Metode Penelitian dan Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif reflektif dengan dasar fenomenologis, karena bertujuan menggali pengalaman, persepsi, dan proses pembentukan makna yang dialami peserta selama kegiatan Kelas Pemuda Antikorupsi 2025. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami fenomena komunikasi partisipatif dan internalisasi nilai integritas secara mendalam dari perspektif partisipan. Proses pengumpulan data dilakukan secara simultan dengan analisis, sesuai dengan prinsip penelitian kualitatif yang menekankan keterpaduan antara observasi, refleksi, dan interpretasi. Analisis data menggunakan teknik analisis tematik-induktif yang diadaptasi dari model Braun dan Clarke (2006), melalui tahapan familiarisasi data dengan membaca dan memahami keseluruhan catatan observasi, refleksi, dan transkrip percakapan untuk menangkap konteks umum; pemberian kode awal terhadap bagian data yang relevan dengan tema komunikasi partisipatif dan nilai integritas; pengelompokan kode menjadi tema utama seperti dialog kesetaraan, refleksi nilai, pemberdayaan moral, dan aksi sosial; serta peninjauan ulang tema untuk memastikan kesesuaian dengan konteks empiris dan kerangka teoritik (Rozali, 2022). Setiap tema kemudian diinterpretasikan secara mendalam dan disusun menjadi narasi analitis yang

menjelaskan hubungan antara komunikasi partisipatif dan proses internalisasi nilai integritas. Seluruh proses analisis dilakukan secara reflektif, berkesinambungan, dan hati-hati untuk menjaga kedalaman makna serta konsistensi interpretasi dalam menggambarkan pengalaman empiris peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Kelas Pemuda Antikorupsi 2025 di wilayah Semarang berlangsung selama dua hari, yaitu pada tanggal 29–30 Oktober 2025, bertempat di Graha Widya Praja – BPSDMD Provinsi Jawa Tengah (Jl. Setiabudi No.201A, Srondol Kulon, Banyumanik, Kota Semarang). Program ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan nasional yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, dengan tujuan memperkuat peran pemuda sebagai agen perubahan dalam pencegahan korupsi dan pembentukan budaya integritas. Suasana kegiatan sejak awal terasa sangat dinamis, menggambarkan antusiasme dan semangat kolaboratif peserta yang berasal dari berbagai latar belakang organisasi kepemudaan, komunitas sosial, dan perguruan tinggi di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Hari pertama kegiatan, Rabu, 29 Oktober 2025, berfokus pada pembekalan konseptual, diskusi nilai, dan penguatan budaya integritas. Kegiatan diawali dengan proses registrasi peserta dan sambutan pembukaan dari perwakilan KPK, yang menegaskan pentingnya keterlibatan pemuda dalam gerakan antikorupsi berbasis nilai. Sesi pembekalan materi pertama bertema *Integritas Kebangsaan*, yang menekankan bahwa korupsi bukan semata persoalan hukum, tetapi krisis moral dan kebangsaan yang menggerogoti semangat nasionalisme. Peserta diajak memahami bagaimana nilai integritas berperan sebagai pilar etika kebangsaan dan identitas moral generasi muda. Materi kedua, *Tindak Pidana Korupsi*, memperkenalkan bentuk-bentuk perilaku koruptif dan dampaknya terhadap kehidupan sosial, dengan pendekatan interaktif berbasis studi kasus. Melalui metode tanya jawab terbuka, peserta menganalisis contoh konkret pelanggaran integritas yang sering terjadi di masyarakat dan institusi.

Pada sesi siang, materi ketiga membahas *Peran Serta Masyarakat dan Rencana Aksi Integritas*. Fasilitator membuka ruang dialog antar peserta untuk menukar pengalaman, gagasan, dan strategi kolaboratif dalam membangun gerakan sosial antikorupsi di lingkungan masing-masing. Kegiatan ini mencerminkan model komunikasi partisipatif yang kuat, di mana peserta aktif berdiskusi, saling mendengarkan, dan mengontruksi solusi bersama. Sesi dilanjutkan dengan *Materi 4: Aksi Kolektif*, berupa simulasi kolaboratif dan latihan penyusunan strategi aksi integritas. Peserta dibagi ke dalam kelompok kecil untuk merancang ide gerakan pemuda antikorupsi yang kontekstual dengan kondisi lokal mereka. Aktivitas ini menumbuhkan semangat kerjasama dan memperlihatkan kemampuan peserta dalam mengartikulasikan nilai integritas ke dalam rencana aksi nyata. Pada malam hari, kegiatan *Budaya Antikorupsi* menutup rangkaian hari pertama melalui pertunjukan seni dan kreativitas peserta. Dalam suasana santai namun penuh makna, peserta menampilkan ekspresi budaya lokal dengan pesan moral tentang kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian menolak korupsi. Momen ini menjadi refleksi kolektif bahwa nilai-nilai antikorupsi dapat diinternalisasi melalui ekspresi sosial dan budaya yang menyenangkan.

Hari kedua, Kamis, 30 Oktober 2025, berfokus pada pembentukan komitmen kolektif dan penguatan karakter melalui aktivitas fisik serta refleksi moral. Kegiatan dimulai dengan sesi *Kesamaptaan (Outbound)* di pagi hari, yang dirancang untuk melatih kedisiplinan, kekompakan, dan

daya juang peserta. Melalui permainan tim dan simulasi tantangan, peserta belajar menerapkan nilai-nilai seperti kerja sama, kejujuran, dan saling percaya dalam situasi dinamis. Aktivitas fisik ini tidak hanya bertujuan membangun stamina, tetapi juga menanamkan disiplin moral dan konsistensi perilaku dalam konteks sosial. Setelah sesi kesampaatan, kegiatan dilanjutkan dengan *Deklarasi Komitmen Bersama dan Penutupan* pada pukul 10.00–12.00 WIB. Dalam momen ini, seluruh peserta secara terbuka menyatakan komitmen untuk menjadi duta integritas di lingkungan masing-masing. Refleksi kegiatan dilakukan secara kolektif, di mana beberapa peserta menyampaikan kesan dan pembelajaran yang mereka alami selama dua hari kegiatan. Deklarasi ini tidak hanya menjadi simbolik, tetapi juga bentuk *moral ownership* atas nilai-nilai integritas yang telah diinternalisasi. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan sertifikat, sesi foto bersama, dan penutupan resmi oleh pihak KPK. Suasana penutupan menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil membangun hubungan emosional dan intelektual yang kuat antar peserta serta memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya budaya antikorupsi.

A. Dinamika Komunikasi Partisipatif dalam Program Kelas Pemuda Antikorupsi 2025

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh proses kegiatan selama dua hari merefleksikan praktik komunikasi partisipatif yang efektif. Fasilitator memposisikan peserta sebagai subjek aktif dalam pembelajaran, bukan sekadar penerima materi. Proses komunikasi berlangsung secara terbuka, egaliter, dan dialogis, terutama melalui kegiatan diskusi kelompok, simulasi aksi integritas, dan pertukaran pengalaman. Peserta terlibat aktif dalam menganalisis kasus, mengidentifikasi nilai moral yang relevan, dan merumuskan strategi aksi sosial. Model komunikasi yang terbentuk bersifat horizontal dan berbasis kesetaraan, sehingga menciptakan suasana interaktif yang mendorong refleksi dan empati. Komunikasi partisipatif ini memunculkan kesadaran kritis terhadap persoalan korupsi sebagai masalah struktural sekaligus moral, serta memperkuat rasa kepemilikan terhadap solusi kolektif (Tarmizi dkk., 2024).

Praktik komunikasi ini menghasilkan proses *co-construction of meaning* pembentukan makna bersama tentang pentingnya nilai kejujuran dan tanggung jawab sosial. Hal ini sejalan dengan gagasan Paulo Freire (1970) yang menekankan pentingnya *dialogue as liberation*, di mana komunikasi menjadi sarana pembebasan kesadaran, bukan sekadar penyampaian informasi. Melalui dialog, peserta mengembangkan kesadaran moral terhadap realitas sosial bahwa korupsi bukan hanya penyimpangan individu, tetapi sistemik dan kultural. Peserta belajar memahami peran mereka sebagai bagian dari solusi sosial, bukan penonton pasif.

Selain itu, pola komunikasi yang terbentuk juga mencerminkan prinsip komunikasi pembangunan partisipatif menurut Servaes (1999) dan Melkote & Steeves (2001), yaitu komunikasi yang bertujuan memberdayakan masyarakat melalui partisipasi aktif dan kesetaraan peran. Interaksi horizontal yang muncul di antara peserta memperlihatkan bahwa komunikasi partisipatif mampu menciptakan suasana kepercayaan dan empati sosial (Servaes, 2022). Dalam konteks ini, peserta tidak hanya belajar tentang antikorupsi, tetapi juga membangun *sense of moral community* komunitas moral yang memiliki kesadaran bersama terhadap nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab publik.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa komunikasi partisipatif tidak sekadar memediasi proses belajar, tetapi juga berfungsi sebagai alat transformasi kesadaran moral. Dalam dialog-dialog yang terbuka, peserta menunjukkan kemampuan merefleksikan posisi etis mereka dalam masyarakat dan menegaskan tanggung jawab sosialnya sebagai pemuda berintegritas. Dengan

demikian, komunikasi partisipatif yang diterapkan dalam Kelas Pemuda Antikorupsi 2025 bukan hanya sarana pedagogis, melainkan juga proses pembentukan identitas moral kolektif yang menumbuhkan semangat kebersamaan dan tanggung jawab sosial.

B. Proses Internalisasi Nilai Integritas pada Peserta

Proses internalisasi nilai integritas yang dialami peserta selama kegiatan berlangsung menunjukkan keterpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan konatif. Tahap pertama, yaitu pemahaman kognitif, muncul melalui sesi pembekalan dan studi kasus yang memberikan pemahaman rasional tentang arti integritas dan dampak korupsi terhadap kehidupan bangsa. Peserta memahami bahwa korupsi merupakan hasil dari lemahnya sistem nilai, bukan semata akibat hukum. Melalui diskusi interaktif, mereka belajar mengenali gejala perilaku tidak etis di lingkungan terdekat seperti kecurangan kecil atau penyalahgunaan kepercayaan sebagai bentuk awal dari pelanggaran integritas.

Tahap kedua, yaitu penghayatan afektif, tampak kuat dalam sesi Budaya Antikorupsi dan Refleksi Nilai. Peserta tidak hanya mendengarkan, tetapi mengalami nilai melalui ekspresi seni, teater, dan kisah pribadi. Kegiatan ini menciptakan *emotional engagement*, di mana nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian tidak sekadar diajarkan, tetapi dirasakan. Dalam perspektif Thomas Lickona (1991), proses ini menggambarkan keterpaduan antara *moral knowing* dan *moral feeling* yang menjadi dasar terbentuknya karakter moral (Arif dkk., 2023).

Tahap ketiga, yaitu penerapan nilai atau dimensi konatif, terlihat pada fase akhir kegiatan ketika peserta menyusun Rencana Aksi Integritas (RAI) dan mendeklarasikan komitmen pribadi. Pada tahap ini, nilai yang sebelumnya bersifat konseptual menjadi prinsip perilaku yang diinternalisasi. Peserta mengubah kesadaran menjadi komitmen sosial yang nyata, seperti inisiatif kampanye nilai di komunitas, pembuatan konten edukatif di media sosial, dan pembentukan kelompok aksi pemuda berintegritas. Dalam kerangka teori nilai Rokeach (1973), tahap ini menunjukkan pergeseran dari *instrumental values* (nilai sebagai pedoman bertindak) menuju *terminal values* (nilai sebagai orientasi moral dan tujuan hidup) (Tuulik dkk., 2016).

Analisis tematik menunjukkan bahwa terdapat empat nilai utama yang paling kuat terinternalisasi pada peserta Kelas Pemuda Antikorupsi 2025 di Semarang, yakni kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, dan keberanian moral. Nilai kejujuran menjadi fondasi utama dalam setiap sesi diskusi dan simulasi kasus. Peserta menyadari bahwa kejujuran merupakan titik awal dari seluruh perilaku berintegritas. Nilai tanggung jawab tampak dalam kesadaran untuk menjaga konsistensi antara perkataan dan tindakan, serta komitmen untuk menjadi teladan di lingkungan masing-masing (Handoko, 2023). Nilai kepedulian muncul dari empati peserta terhadap dampak sosial korupsi, yang kemudian mendorong mereka untuk aktif dalam gerakan sosial antikorupsi. Sementara itu, nilai keberanian moral terwujud dalam kesiapan peserta untuk menyuarakan kebenaran dan menolak kompromi terhadap perilaku koruptif, meskipun menghadapi tekanan sosial. Keempat nilai tersebut saling melengkapi dan membentuk landasan karakter moral yang kuat, menjadi basis bagi terbentuknya budaya integritas dalam diri generasi muda.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi partisipatif yang diterapkan KPK dalam Program Kelas Pemuda Antikorupsi 2025 mampu menciptakan ruang pembelajaran yang bermakna dan memberdayakan. Melalui komunikasi dialogis, peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam membangun pemahaman dan kesadaran moral bersama. Pengalaman reflektif selama dua hari kegiatan

menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi yang berbasis partisipasi mampu mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan konatif dalam proses pembentukan nilai. Dengan demikian, kegiatan ini tidak sekadar memberikan pengetahuan tentang korupsi, tetapi menjadi wahana transformasi moral dan sosial bagi pemuda Indonesia. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa komunikasi partisipatif merupakan strategi efektif untuk membangun budaya integritas melalui pengalaman belajar yang dialogis, kritis, dan transformatif.

Pembahasan

A. Komunikasi Partisipatif sebagai Fondasi Pendidikan Nilai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan *Kelas Pemuda Antikorupsi* 2025 dalam membangun kesadaran integritas peserta sangat bergantung pada penerapan komunikasi partisipatif. Pendekatan ini memungkinkan interaksi yang bersifat dialogis, kolaboratif, dan egaliter antara fasilitator dan peserta. Proses pembelajaran tidak bersifat *top-down* atau indoktrinatif, tetapi berbasis pada pertukaran gagasan dan pengalaman, sehingga setiap peserta menjadi subjek aktif dalam membangun makna tentang nilai-nilai antikorupsi. Bentuk-bentuk kegiatan seperti diskusi kelompok, simulasi aksi integritas, dan refleksi nilai merupakan ruang komunikasi yang menghidupkan prinsip *dialogical action* sebagaimana dikemukakan oleh Paulo Freire (1970) dalam *Pedagogy of the Oppressed*. Freire menegaskan bahwa pendidikan yang manusiakan harus bersandar pada dialog yang membebaskan, bukan transfer pengetahuan sepahak (Sinara, 2025). Dalam konteks ini, komunikasi partisipatif di kelas menjadi media pembentukan kesadaran kritis (*conscientization*), di mana peserta diajak untuk mengenali akar persoalan korupsi sebagai problem struktural sekaligus moral.

Lebih jauh, pendekatan komunikasi yang diterapkan oleh fasilitator KPK juga mencerminkan paradigma komunikasi pembangunan partisipatif. Komunikasi partisipatif dipahami sebagai proses sosial yang menumbuhkan *ownership* dan *empowerment*, bukan sekadar penyampaian pesan atau persuasi moral (Jaya, 2023). Dalam kegiatan kelas, hal ini terlihat dari cara fasilitator membuka ruang bagi peserta untuk menganalisis kasus nyata, berbagi pengalaman, dan merumuskan solusi berdasarkan konteks sosial mereka sendiri. Kesetaraan dalam komunikasi ini menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap nilai integritas (Fatimah dkk., 2025). Setiap individu tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memberikan kontribusi intelektual dan emosional terhadap pembentukan pemahaman kolektif tentang antikorupsi. Proses pembelajaran yang berlandaskan pada kesetaraan dan pengalaman nyata inilah yang menjadikan komunikasi partisipatif sebagai fondasi utama dalam pendidikan nilai, karena menciptakan keterlibatan personal, kesadaran reflektif, dan aksi moral yang lahir dari pemahaman diri dan realitas sosial peserta.

B. Internalisasi Nilai Integritas Melalui Komunikasi Partisipatif

Proses internalisasi nilai integritas yang terjadi dalam *Kelas Pemuda Antikorupsi* 2025 menunjukkan adanya keterpaduan antara komunikasi, pengalaman, dan refleksi. Berdasarkan hasil observasi dan refleksi lapangan, internalisasi nilai berlangsung melalui tiga tahapan utama: kognitif, afektif, dan konatif. Tahap kognitif dimulai saat peserta memperoleh pemahaman intelektual tentang konsep integritas melalui materi, studi kasus, dan dialog tematik. Pada tahap ini, peserta menyadari bahwa korupsi bukan hanya kejahanan hukum, tetapi juga kegagalan moral yang berakar pada hilangnya nilai kejujuran dan tanggung jawab. Komunikasi partisipatif pada tahap ini

mendorong peserta berpikir kritis terhadap realitas sosial dan memaknai integritas sebagai nilai universal yang perlu dihidupi, bukan sekadar dipahami.

Tahap afektif muncul ketika peserta menginternalisasi nilai-nilai tersebut melalui pengalaman emosional dan refleksi sosial. Sesi seperti *malam budaya antikorupsi* atau kegiatan refleksi kelompok menciptakan suasana dialog yang intim dan empatik. Peserta berbagi kisah pribadi, dilema moral, serta pengalaman menghadapi ketidakjujuran di lingkungan masing-masing. Dalam konteks ini, komunikasi partisipatif berfungsi sebagai medium empati tempat nilai tidak hanya diucapkan, tetapi dirasakan bersama. Menurut Thomas Lickona (1991), pendidikan karakter yang efektif harus mencakup tiga dimensi: *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action* (Hikmasari dkk., 2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan partisipatif di kelas berhasil mengintegrasikan ketiganya. Peserta tidak hanya memahami nilai secara rasional, tetapi juga merasakan maknanya secara emosional.

Tahap konatif atau perilaku muncul ketika peserta mengubah kesadaran nilai menjadi komitmen tindakan nyata. Pada tahap ini, komunikasi berperan sebagai penghubung antara nilai dan aksi sosial. Nilai-nilai yang sebelumnya bersifat konseptual berubah menjadi prinsip hidup yang mendorong perilaku berintegritas. Dalam teori nilai Milton Rokeach (1973), tahapan ini menggambarkan pergeseran dari *instrumental values* (nilai sebagai pedoman bertindak) menuju *terminal values* (nilai sebagai tujuan hidup) (Tuulik dkk., 2016). Dalam kegiatan kelas, proses ini tampak dari komitmen peserta untuk menerapkan nilai integritas dalam kehidupan pribadi, organisasi, dan komunitas. Beberapa peserta bahkan menyampaikan rencana konkret, seperti menyelenggarakan kampanye kejujuran di sekolah, memproduksi konten digital edukatif, dan menginisiasi gerakan sosial antikorupsi di daerah. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi partisipatif tidak hanya menghasilkan pemahaman intelektual, tetapi juga menggerakkan tindakan sosial yang berakar pada kesadaran nilai.

C. Rencana Aksi Integritas sebagai Manifestasi Aksi Sosial

Salah satu hasil paling signifikan dari *Kelas Pemuda Antikorupsi 2025* adalah lahirnya Rencana Aksi Integritas (RAI) sebagai produk nyata dari proses pembelajaran partisipatif. RAI bukan sekadar laporan kegiatan, tetapi bentuk konkret dari transformasi nilai menjadi tindakan sosial. Dalam proses penyusunannya, peserta difasilitasi untuk menganalisis permasalahan korupsi di daerah masing-masing, mengidentifikasi faktor penyebabnya, dan merancang rencana aksi yang relevan dengan kondisi sosial setempat. Fasilitator berperan sebagai *co-creator* dalam proses ini, memastikan setiap gagasan peserta lahir dari dialog dan refleksi bersama, bukan arahan sepihak. Pendekatan ini mencerminkan konsep *reflection and action (praxis)* yang dikemukakan oleh Freire (1970), bahwa kesadaran sejati hanya lahir ketika refleksi kritis disertai dengan tindakan nyata (Firdaus & Mariyat, 2017).

Rencana aksi yang dihasilkan oleh peserta beragam dan inovatif. Di bidang pendidikan, muncul ide penyuluhan antikorupsi di sekolah, pembuatan karya seni kampanye integritas, hingga pelatihan etika bagi pelajar dan mahasiswa. Di bidang pencegahan, peserta mengusulkan kegiatan penelitian dan penulisan opini publik tentang kebijakan publik, serta advokasi transparansi anggaran di lingkungan kampus atau organisasi. Sementara di bidang penindakan sosial, terdapat inisiatif pengawasan kebijakan publik, advokasi masyarakat, dan pelaporan dugaan korupsi di tingkat lokal. Seluruh bentuk aksi ini memperlihatkan bahwa komunikasi partisipatif di kelas berhasil memfasilitasi proses *co-creation of meaning*, di mana peserta tidak hanya belajar tentang

integritas, tetapi menjadi produsen nilai yang menerjemahkan pengetahuan menjadi strategi perubahan sosial.

Nilai-nilai yang menjiwai penyusunan RAI kejujuran, tanggung jawab, keberanian, kepedulian, dan keadilan menunjukkan keberhasilan internalisasi nilai dalam tataran perilaku sosial. Dalam perspektif Rokeach (1973), nilai-nilai ini merupakan *instrumental values* yang mengarahkan tindakan untuk mencapai *terminal values* berupa kehidupan yang adil dan berintegritas. Proses kolektif ini juga memperlihatkan bahwa komunikasi partisipatif mampu membentuk kesadaran moral sosial yang bersifat *shared ethics* etika bersama yang tumbuh dari pengalaman dialogis. Dalam konteks *Kelas Pemuda Antikorupsi 2025*, RAI menjadi bukti bahwa pendidikan antikorupsi berbasis komunikasi partisipatif tidak berhenti pada tataran kognitif, tetapi bergerak menuju aksi sosial transformatif yang menumbuhkan jejaring pemuda berintegritas di berbagai daerah.

D. Implikasi bagi Pendidikan Nilai dan Budaya Integritas Pemuda Indonesia

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan pendidikan nilai dan pembentukan budaya integritas di kalangan generasi muda Indonesia. Pertama, penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi partisipatif adalah strategi yang efektif untuk membangun pendidikan antikorupsi yang berkelanjutan. Model pembelajaran yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif bukan objek didikan terbukti mampu meningkatkan kesadaran moral, empati sosial, dan rasa tanggung jawab terhadap isu integritas. Pendidikan nilai yang berbasis dialog dan pengalaman partisipatif lebih mudah diterima karena berangkat dari realitas sosial peserta, bukan doktrin normatif.

Kedua, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemuda memiliki potensi besar sebagai agen perubahan sosial dalam membangun budaya antikorupsi. Melalui keterlibatan aktif dalam komunikasi partisipatif, pemuda dapat mengembangkan kapasitas kepemimpinan moral (*moral leadership*) yang berorientasi pada kejujuran dan tanggung jawab publik. Hal ini sejalan dengan pandangan UNESCO (2018) mengenai *ethical citizenship*, yang menekankan pentingnya pendidikan karakter untuk membentuk warga muda yang beretika dan berkomitmen terhadap kepentingan sosial. Dengan demikian, Kelas Pemuda Antikorupsi 2025 dapat menjadi model pendidikan nilai yang dapat direplikasi di berbagai konteks kelembagaan dan daerah.

Ketiga, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan teori komunikasi partisipatif dalam konteks pendidikan moral dan nilai. Selama ini, komunikasi partisipatif lebih banyak diterapkan dalam konteks pembangunan masyarakat, namun penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan yang sama efektif diterapkan dalam pendidikan karakter dan antikorupsi. Melalui dialog, refleksi, dan kolaborasi, komunikasi partisipatif terbukti mampu mempertemukan dimensi kognitif (pengetahuan), afektif (penghayatan), dan konatif (tindakan) dalam satu kerangka pembelajaran moral yang utuh.

Akhirnya, pembahasan ini menegaskan bahwa pembangunan budaya integritas di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari praktik komunikasi yang partisipatif, reflektif, dan empatik. Pendidikan antikorupsi yang menumbuhkan kesadaran kritis, partisipasi aktif, dan tanggung jawab sosial adalah jalan strategis untuk melahirkan generasi muda yang berkarakter dan berintegritas. Program Kelas Pemuda Antikorupsi 2025 menjadi contoh nyata bahwa komunikasi partisipatif bukan hanya pendekatan komunikasi, tetapi juga gerakan pembentukan kesadaran moral yang berkontribusi terhadap pembangunan bangsa.

KESIMPULAN

Komunikasi partisipatif terbukti menjadi strategi yang efektif dalam membangun kesadaran, penghayatan, dan penerapan nilai integritas di kalangan pemuda Indonesia. Melalui pendekatan yang dialogis, kolaboratif, dan reflektif, *Program Kelas Pemuda Antikorupsi 2025* yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mampu menciptakan ruang pendidikan yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Selama dua hari pelaksanaan di Semarang, komunikasi partisipatif berperan penting dalam menumbuhkan pemahaman kritis mengenai korupsi, memperkuat kesadaran moral, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial terhadap nilai kejujuran dan keadilan publik. Proses ini menunjukkan bahwa pendidikan nilai yang berbasis kesetaraan dan dialog mampu membentuk generasi muda yang reflektif dan peduli terhadap etika sosial. Proses internalisasi nilai integritas berlangsung menyeluruh melalui tiga dimensi pembentukan nilai: kognitif, afektif, dan konatif. Pada ranah kognitif, peserta memahami integritas sebagai persoalan moral dan tanggung jawab kebangsaan; pada ranah afektif, mereka menghayati nilai-nilai integritas melalui pengalaman sosial, ekspresi budaya, dan refleksi emosional; sedangkan pada ranah konatif, nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata melalui penyusunan dan pelaksanaan *Rencana Aksi Integritas (RAI)*. Pembelajaran berbasis partisipasi ini menjembatani pengetahuan moral dan tindakan etis, sehingga membentuk perubahan sikap yang berkelanjutan. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif jauh lebih efektif dalam menumbuhkan kesadaran moral dibandingkan model pendidikan yang bersifat instruktif atau satu arah.

Empat nilai utama yang paling kuat terinternalisasi selama kegiatan adalah kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, dan keberanian moral. Keempat nilai ini membentuk fondasi karakter moral yang menjadi dasar bagi terbentuknya budaya integritas di kalangan generasi muda. Kejujuran menjadi landasan setiap tindakan berintegritas; tanggung jawab menggambarkan konsistensi antara pikiran, ucapan, dan perilaku; kepedulian menumbuhkan empati sosial terhadap dampak korupsi; sedangkan keberanian moral memperlihatkan keteguhan untuk menolak penyimpangan, meskipun dihadapkan pada tekanan sosial. Keseluruhan nilai ini terbentuk melalui proses komunikasi partisipatif yang memberi ruang bagi refleksi diri, dialog sosial, dan pengalaman kolaboratif yang membentuk kesadaran moral kolektif. Pendidikan antikorupsi yang berlandaskan komunikasi partisipatif menjadi pendekatan strategis dalam membangun generasi muda yang berkarakter, beretika, dan berintegritas. Pendekatan ini mengintegrasikan pengetahuan, sikap, dan tindakan dalam satu proses pembelajaran yang utuh dan bermakna. *Kelas Pemuda Antikorupsi 2025* di Semarang menjadi bukti nyata bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada aspek hukum dan kebijakan, tetapi juga pada kekuatan membangun kesadaran moral dan budaya integritas melalui praktik komunikasi yang reflektif, setara, dan kolaboratif. Model pendidikan ini layak dijadikan rujukan bagi pengembangan program pembinaan karakter dan gerakan sosial pemuda di berbagai daerah, sebagai langkah strategis dalam memperkuat fondasi etika bangsa Indonesia di masa depan.

REFERENSI

- Aditia, R. (2021). Sistem Komunikasi Indonesia: Suatu Proses Sosial, Budaya, dan Politik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1). <https://jpii.upri.ac.id/index.php/connected/article/view/9>

- Arif, M., Abdurakhmonovich, Y. A., & Dorloh, S. (2023). Character Education in the 21st Century: The Relevance of Abdul Wahhab Ash Syarani's and Thomas Lickona's Concepts. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 12(1), 35–58. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v12i1.690>
- Asman, F. K. M., Rangga, P., & Rabawati, D. W. (2024). Penegakan Kode Etika Profesi KPK. *Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, 2(1), 68–77.
- Asmorojati, A. W. (2017). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *URECOL*, 491–498.
- Caesaria, K. C. G., Suharto, B., Isnaini, S., & Agustina, T. S. (2023). Analisis Komunikasi Interaksionisme Simbolik Festival: Studi Kasus Tomohon International Flower Festival (TIFF). *Jurnal Common*, 7(1). <https://doi.org/10.34010/common.v7i1.9680>
- Damariswara, R., Wiguna, F. A., Khunaifi, A. A., Zaman, W. I., & Nurwenda, D. D. (2021). Penyuluhan Pendidikan Karakter Adaptasi Thomas Lickona. *Dedikasi Nusantara: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pendidikan Dasar*, 1(1), 25–32. <https://doi.org/10.29407/dedikasi.v1i1.16057>
- Erni Irdewanti, Yustikasari, & Siti Karlinah. (2025). Komunikasi Internal BUMN dalam Menjembatani Kesenjangan Generasi: (Studi Kasus Mengenai Interaksi Antargenerasi di Lingkungan Kerja PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko). *JURNAL LENSA MUTIARA KOMUNIKASI*, 8(2), 181–198. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v8i2.5428>
- Fatimah, Y., N. A. J., & Sianturi, M. K. (2025). Meningkatkan Keharmonisan Sosial dalam Pembangunan Wilayah Multietnis melalui Pendekatan Komunikasi Antarbudaya. *Indonesian Culture and Religion Issues*, 2(1), 10–10. <https://doi.org/10.47134/diksima.v2i1.145>
- Firdaus, F. A., & Mariyat, A. (2017). Humanistic Approach In Education According To Paulo Freire. *At-Ta'dib*, 12(2), 25. <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v12i2.1264>
- Freire, P., & Macedo, D. P. (2014). *Pedagogy of the oppressed: 30th Anniversary Edition* (M. B. Ramos, Penerj.; 30th anniversary edition). Bloomsbury Publishing.
- Handoko, Y. (2023). Disiplin dan nilai-nilai religius dalam membentuk perilaku tagguh dan tanggung jawab. *Indonesian Journal of Islamic Religious Education (INJIRE)*, 1(2). <https://doi.org/10.63243/32mpnt61>
- Hansein Arif Wijaya, Yudelnilastia, Sitti Hartinah D.S, Hernawati, Kurniati Rahmadani, Maria Ulviani, Lidia Nusir, & Muhammad Abduh. (2025). Pendidikan Karakter. Aikomedia Press.
- Haris, A., & Amalia, A. (2018). Makna dan Simbol dalam Proses Interaksi Sosial (Sebuah Tinjauan Komunikasi). *Jurnal Dakwah Risalah*, 29(1), 16. <https://doi.org/10.24014/jdr.v29i1.5777>
- Hikmasari, D. N., Susanto, H., & Syam, A. R. (2021). Konsep Pendidikan Karakter Perspektif Thomas Lickona dan Ki Hajar Dewantara. *AL-ASASIYYA: Journal Of Basic Education*, 6(1), 19–31. <https://doi.org/10.24269/ajbe.v6i1.4915>
- Ido Prijana Hadi. (2020). Penelitian Media Kualitatif. PT Raja Grafindo Persada.
- Jaya, M. N. (2023). Pemberdayaan Kelompok Tani Berbasis Komunikasi Pembangunan Partisipatif dan Pemanfaatan Modal Sosial. *CV Widina Media Utama*. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/559033>
- KPK RI. (2025, Oktober 6). Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2025-2029. KPK RI. <https://cms.kpk.go.id/storage/8707/33.-Peraturan-KPK-Nomor-2-Tahun-2025-tentang-Renstra-KPK-Tahun-2025-2029.pdf>
- Muhammad, M. Y., Suryatna, U., & Agustini. (2025). Strategi Komunikasi Sosial Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Keterlibatan Warga terhadap Pembangunan Desa Sentul. *Karimah Tauhid*, 4(9), 7581–7594. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i10.21305>
- Nainggolan, E. E. (2024). Perilaku korupsi: Tinjauan psikologi, sosial, politik dan budaya. *INNER: Journal of Psychological Research*, 4(1), 45–51.
- Nurrindar, M., & Wahjudi, E. (2021). Pengaruh Self-efficacy Terhadap Keterlibatan Siswa Melalui Motivasi Belajar. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 9(1), 140–148. <https://doi.org/10.26740/jpak.v9n1.p140-148>
- Permas. (2025, Februari 10). Kelas Pemuda dan LSM Antikorupsi—Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat. <https://permas.kpk.go.id/kelas-pemuda-dan-lsm-antikorupsi/>
- Pranata, R., Sarwoprasodjo, S., & Satria, A. (2021). Strategi Komunikasi dalam Gerakan Penolakan Isu Relokasi dan Penutupan Pulau Komodo. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 19(02), 111–124. <https://doi.org/10.46937/19202137066>
- Rani, S. (2016). Strategi Komunikasi dalam Pembangunan Desa Berbasis Partisipatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 15(29). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v15i29.1014>
- Rozali, Y. A. (2022). Penggunaan Analisis Konten dan Analisis Tematik. *Forum Ilmiah*, 19(1). https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-23187-11_2247.pdf

- Sahlan, S., & Nurdin, N. (2022). Peran Pemuda Dalam Aktualisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Melalui Pelatihan Dasar Kepemimpinan. *Madaniya*, 3(1), 25–30. <https://doi.org/10.53696/27214834.130>
- Servaes, J. (2022). The Relevance of Rabindranath Tagore and Paulo Freire for Participatory Communication. Dalam A. Kaushik & A. Suchiang (Ed.), *Narratives and New Voices from India: Cases of Community Development for Social Change* (hlm. 25–40). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-2496-5_3
- Sinara, R. (2025). Reformasi Sistem Pendidikan Tinggi dalam Perspektif Paulo Freire: Dari Dominasi Menuju Emansipasi Akademik. *Journal of Political Studies and Civic Engagement*, 1(2). https://www.researchgate.net/profile/Ridwan-Sinara/publication/397215067_Reformasi_Sistem_Pendidikan_Tinggi_dalam_Perspektif_Paulo_Freire_Dari_Dominasi_Menuju_Emansipasi_Akademik/links/6909011dc900be105cbcd798/Reformasi-Sistem-Pendidikan-Tinggi-dalam-Perspektif-Paulo-Freire-Dari-Dominasi-Menuju-Emansipasi-Akademik.pdf
- Tarmizi, M., Lubis, S., & Zulkarnain, I. (2024). Pola Komunikasi Antarpribadi dalam Membangun Budaya Antikorupsi pada Keluarga Pegawai Beacukai. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4472–4480. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4227>
- Tuulik, K., Ōunapuu, T., Kuimet, K., & Titov, E. (2016). Rokeach's instrumental and terminal values as descriptors of modern organisation values. *International Journal of Organizational Leadership*, 5(2), 151–161. <https://doi.org/10.33844/ijol.2016.60252>
- Wisman, Y. (2017). Komunikasi Efektif dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Nomosleca*, 3(2). <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v3i2.2039>